

**INDEPENDENSI KPK DI INDONESIA BERDASARKAN  
SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL**

**TESIS**

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister Ilmu Hukum



**Putri Mega Silvia Pa**

**NIM : 322016004**

**1956**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA**

**SALATIGA**

**2019**



PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS  
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA  
Jl. Diponegoro 52 – 60 Salatiga 50711  
Jawa Tengah, Indonesia  
Telp. 0298 – 321212, Fax. 0298 321433  
Email: library@adm.uksw.edu ; http://library.uksw.edu

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Mega Silvia Pa  
NIM : 322016004 Email : Putry.megasilvia@gmail.com  
Fakultas : Magister Ilmu Hukum Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul tugas akhir : Independensi KPK di Indonesia Berdasarkan Sistem Pemerintahan Presidensial  
Pembimbing : 1. Dr.Titon Slamet Kurnia, S.H, M.H  
2. Dr. Umbu Rauta, S.H.,M.Hum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Kristen Satya Wacana maupun di institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Kristen Satya Wacana.

Salatiga, 10 September 2018



Putri Mega Silvia Pa

Tanda tangan & nama terang mahasiswa



PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS  
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA  
Jl. Diponegoro 52 – 60 Salatiga 50711  
Jawa Tengah, Indonesia  
Telp. 0298 – 321212, Fax. 0298 321433  
Email: library@adm.uksw.edu ; http://library.uksw.edu

## PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Mega Silvia Pa  
NIM : 322016004 Email : Putry.megasilvia@gmail.com  
Fakultas : Magister Ilmu Hukum Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul tugas akhir : Independensi KPK di Indonesia Berdasarkan Sistem Pemerintahan Presidensial

Dengan ini saya menyerahkan hak *non-eksklusif*\* kepada Perpustakaan Universitas – Universitas Kristen Satya Wacana untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak yang sesuai):

- ☒ a. Saya mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repositori Perpustakaan Universitas, dan/atau portal GARUDA
- ☐ b. Saya tidak mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repositori Perpustakaan Universitas, dan/atau portal GARUDA\*\*

\* Hak yang tidak terbatas hanya bagi satu pihak saja. Pengajar, peneliti, dan mahasiswa yang menyerahkan hak *non-eksklusif* kepada Repositori Perpustakaan Universitas saat mengumpulkan hasil karya mereka masih memiliki hak *copyright* atas karya tersebut.

\*\* Hanya akan menampilkan halaman judul dan abstrak. Pilihan ini harus dilampiri dengan penjelasan/ alasan tertulis dari pembimbing I dan diketahui oleh pimpinan fakultas (dekan/kaprodi).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Salatiga, 10 September 2018

Putri Mega Silvia Pa

Tanda tangan & nama terang mahasiswa

Mengetahui,

Dr. Titon Slamet Kurnia, S.H, M.H

Tanda tangan & nama terang pembimbing I

Dr. Umbu Rauta S.H, M.Hum

Tanda tangan & nama terang pembimbing II

**Lembaran Persetujuan**

**INDEPENDENSI KPK DI INDONESIA BERDASARKAN SISTEM  
PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL**

**TESIS**

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister Hukum

**Putri Mega Silvia Pa**

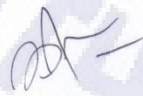
**NPM : 322016004**

Telah Disetujui Untuk Diuji :

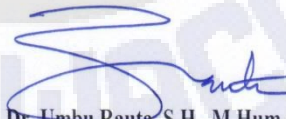
**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**1956**



**Dr. Titon Slamet Kurnia, S.H., M.H**



**Dr. Umbu Rauta, S.H., M.Hum**



Lembar Pengesahan

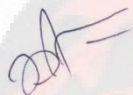
INDEPENDENSI KPK DI INDONESIA BERDASARKAN SISTEM  
PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL

Putri Mega Silvia Pa

NIM : 322016004

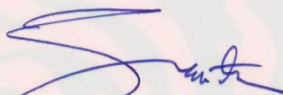
Program Studi Magister Ilmu Hukum

Penguji I



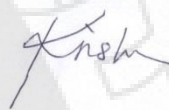
Dr. Titon Slamet Kurnia, S.H., M.H

Penguji II



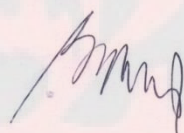
Dr. Umbu Rauta, S.H., M.Hum

Penguji III



Dr. Krishna Djaya Darumurti, S.H., M.H

Penguji IV



Dr. Tri Budivono, S.H., M.Hum

Diuji pada Tanggal 05 Oktober 2018

Diketahui,

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Tri Budivono, S.H., M.Hum

## KATA PENGANTAR

Tesis penulis berjudul “Kedudukan KPK Sebagai Lembaga Independen di Indonesia Berdasarkan Sistem Pemerintahan Presidensial”. Latar belakang penulisan tesis ini berkaitan dengan keinginan penulis untuk menganalisis lebih lanjut tentang kedudukan KPK ditinjau dari sistem pemerintahan yang dianut Indonesia yakni sistem pemerintahan Presidensial. Diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa sumbangan pemikiran yang menunjukkan bahwa kedudukan KPK sebagai lembaga independen memiliki implikasi terhadap kedudukan presiden berdasarkan sistem pemerintahan serta dapat menjadi referensi untuk melakukan evaluasi bagi kehadiran lembaga-lembaga independen di Indonesia.

Pertama-tama Bab I akan menguraikan latar belakang lebih lanjut dengan mengemukakan alasan yang mendasari dimulainya penulisan tesis ini disertai dengan kerangka teori dan metodologi penelitian yang menjadi acuan dalam penelitian ini.

Pada Bab II akan menguraikan tentang kekuasaan berdasarkan *The Unitary Executive Theory* dan *The Plural Executive Theory* yang akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada.

Pada Bab III penulis akan menguraikan Eksistensi Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimulai dengan kehadiran lembaga independen di Indonesia, KPK sebagai lembaga independen, serta penulis akan memberikan kritik terhadap KPK sebagai lembaga independen ditinjau dari sistem Pemerintahan Presidensial.

Pada Bab IV sebagai bab terakhir, penulis akan menyampaikan kesimpulan dan saran yang diharapkan bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum terkhususnya Ilmu Hukum Tata Negara di Indonesia.



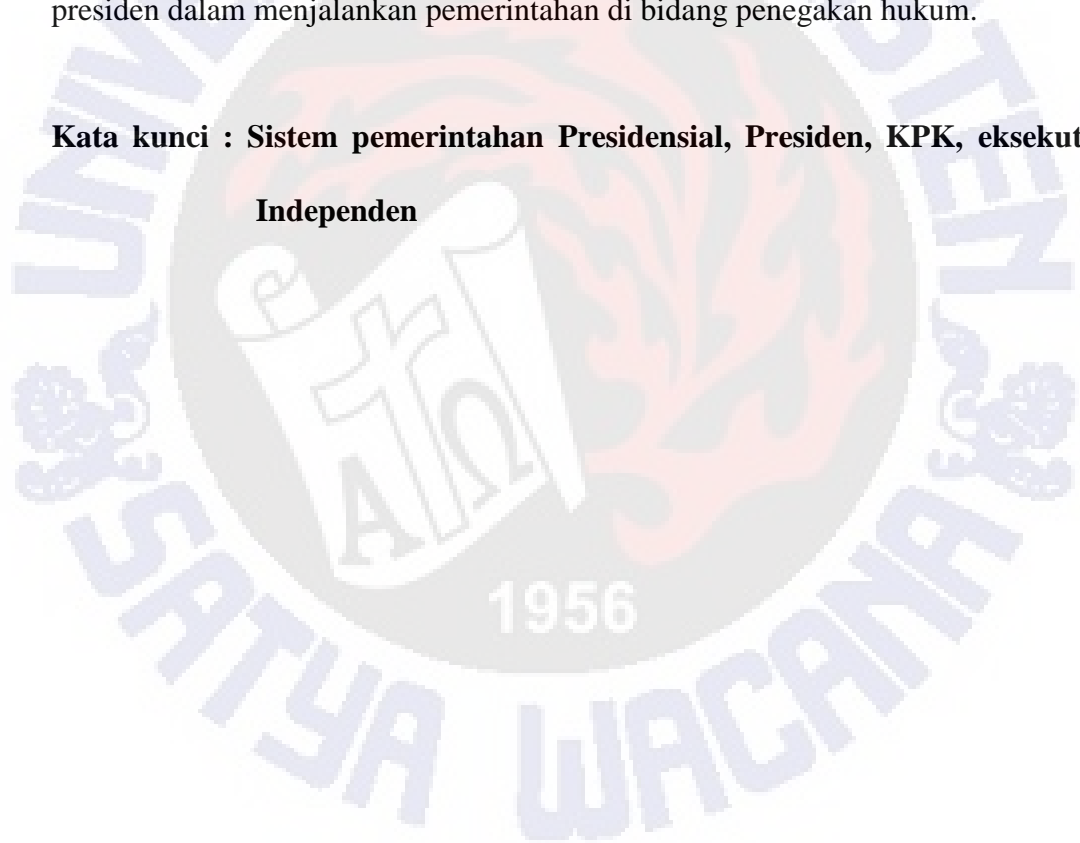
## **ABSTRAK**

Sistem pemerintahan yang dianut Indonesia ialah sistem pemerintahan Presidensial. Di dalam sistem ini pemegang kekuasaan tunggal pemerintahan berada ditangan presiden. Di Indonesia kedudukan Presiden tercermin dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang mana Presiden memiliki kedudukan sebagai Kepala Pemerintahan (*chief of executive*).

Kehadiran KPK selanjutnya menjadi sebuah isu dimana bersifat independen yang dibentuk berdasarkan UU KPK. Namun dalam kenyataannya, KPK merupakan lembaga yang dalam melaksanakan tugasnya menjalankan fungsi eksekutif. Disinilah yang menjadi kajian penulis, mengingat kehadirannya dalam UU telah membatasi kekuasaan Presiden yang mana kewenangannya tersebut didapat langsung dari konstitusi. Pembatasan kekuasaan Presiden tersebut tercermin dari pengangkatan dan pemberhentian jabatan serta pengurangan fungsi presiden dalam menjalankan pemerintahan di bidang penegakan hukum.

**Kata kunci : Sistem pemerintahan Presidensial, Presiden, KPK, eksekutif,**

**Independen**





## DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan .....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Lembar Pernyataan Orisinalitas Tesis .....	iii
Ucapan Terima Kasih .....	iv
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi .....	viii
Abstrak.....	x

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian.....	12

### BAB II KEKUASAAN PRESIDEN BERDASARKAN THE UNITARY EXECUTIVE THEORY

A. <i>The Unitary Executive Theory</i>	
1. Prinsip <i>The unitary Executive Theory</i> .....	15
2. Hak Prerogatif Presiden berdasarkan <i>The unitary executive theory</i> .....	22
3. Ruang Lingkup <i>The Unitary Executive Theory</i> .....	27
B. <i>The Plural Executive Theory</i>	
1. Prinsip <i>The Plural Executive Theory</i> .....	29
2. Ruang Lingkup <i>The Plural Executive Theory</i> .....	34
C. Perbedaan Sistem Pemerintahan Presidensial Dan Sistem Pemerintahan Parlementer.....	38
D. Kedudukan Presiden Di Dalam UUD NRI Tahun 1945 .....	43

### BAB III EKSISTENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

A. Lembaga Independen di Indonesia.....	50
B. KPK Sebagai Lembaga Independen	
1. Latar Belakang Pembentukan KPK .....	56
2. Tugas, Wewenang dan Kewajiban KPK.....	62
3. Independensi KPK di Indonesia.....	65
C. Kritik Terhadap KPK Sebagai Lembaga Independen Di Tinjau Dari Sistem Pemerintahan Presidensial	
1. KPK sebagai Eksekutif .....	72
2. KPK Sebagai Eksekutif Harusnya Koheren Dengan	

Pasal 4 Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 .....	77
---	----

#### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	88
B. Saran.....	90

<b>DAFTAR BACAAN</b> .....	91
----------------------------	----

